

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian

Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Dewi & Putri, 2015a) melakukan penelitian tentang Pengaruh Book Tax Difference, Arus Kas Operasi, Dan Ukuran Perusahaan pada Persistensi Laba. Populasi yang digunakan adalah perusahaan perhotelan dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan metode purposive sampling, sampel berjumlah 14 perusahaan dengan periode pengamatan 2009-2011. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa perbedaan temporer, perbedaan permanen, arus kas operasi dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap persistensi laba, sementara arus kas akrual tidak berpengaruh terhadap persistensi laba.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Salsabila et al., 2016) melakukan penelitian untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *book tax differences* dan aliran kas operasi terhadap persistensi laba. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Teknik pemilihan sampel adalah menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 15 perusahaan yang disertakan dalam kurun waktu 5 tahun sehingga dapat 75 sampel yang diobservasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan *software* Eviews 8.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan permanen, perbedaan temporer dan aliran kas operasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba. Sedangkan secara parsial perbedaan permanen dan perbedaan temporer tidak berpengaruh terhadap persistensi laba dan aliran kas operasi berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap persistensi laba.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Nurul Septavita, 2016) meneliti pengaruh *book tax differences*, arus kas operasi, tingkat

hutang, dan ukuran perusahaan terhadap persistensi laba. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbedaan permanen dan perbedaan temporer yang merupakan proksi dari perbedaan pajak buku arus kas operasi, tingkat utang, dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah persistensi laba. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2011-2013, di mana total populasi digunakan oleh 19 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dimana jumlah pengamatan yang diperoleh penelitian ini adalah 57 (19x3). Analisis data dilakukan dengan model regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 20,0. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, uji regresi parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel independen perbedaan temporer, arus kas operasi, tingkat utang, dan ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap persistensi laba, sedangkan variabel perbedaan permanen tidak secara signifikan mempengaruhi persistensi laba.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Putri et al., 2017) yaitu Aliran kas operasi, *book tax differences*, dan tingkat hutang terhadap persistensi laba. Serta variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap persistensi laba. Variabel *book tax differences* diproyeksikan dengan variabel perbedaan temporer akibat dari perbedaan kebijakan akuntansi dan fiskal. Penelitian bersifat deskriptif verifikatif yang bersifat kausalitas. Jumlah perusahaan manufaktur sub sektor otomotif di BEI selama periode 2011-2015 yang masuk sebagai daftar populasi adalah sebanyak 13 perusahaan, kemudian didapatkan sampel sebanyak 10 perusahaan. Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil analisis regresi data panel dengan menunjukan kas operasi, *book ta differences*, dan tingkat hutang mempengaruhi persistensi laba sebesar 35%. Secara persial di dapatkan arus kas operasi dan tingkat hutang berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan *book tax differences* tidak berpengaruh terhadap persistensi laba.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Gunarto, 2019) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *book tax differences* dan

tingkat utang terhadap persistensi laba. Data yang digunakan dan di peroleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2016. Metode penelitian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dan teknik analitis yang digunakan adalah regresi linier berganda yang meliputi uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Total sampel yang terdapat dalam penelitian ini sebanyak 16 perusahaan. Pengolaha data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Eviews versi 09. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *book tax differences* dan tingkat utang secara simultan berpengaruh terhadap persistensi laba. Selain itu penelitian ini membuktikan secara persial bahwa perbedaan permanen dan tingkat utang berpengaruh terhadap persistensi laba. Sedangkan perbedaan temporer secara persial tidak berpengaruh terhadap persistensi laba.

Menurut penelitian yang di lakukan oleh Moghaddam dan Aslani (2017) Dampak komponen dividen tunai terhadap persistensi laba dan pengembalian stok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak komponen dividen tunai terhadap persistensi laba corporate dan laba atas saham. Populasi penelitian terdiri dari 109 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehren (Iran) dari tahun 2011 hingga 2016. Data di analisis menggunakan model regresi. Hasil penelitian menunjukkan komponen tunai dari penghasilan lebih presisten dari pada akrual dan dapat di gunakan untuk memprediksi penghasilan di masa depan. Oleh karena itu, di sarankan agar komponen dividen tunai digunakan untuk memprediksi pendapatan masa depan. selain itu manejer harus memperhatikan komponen kas pendapatan dalam mengambil keputusan yang mereka buat pada jumlah dana tunai yang optimal karena komponen ini dapat secara positif mempengaruhi pendapatan masa depan. Bahkan komponen kas penghasilan tidak dapat di gunakan untuk memprediksi pengambilan saham di masa depan. karena itu investor di sarankan untuk tidak mengandalkan komponen kas dari pendapatan dalam investasi mereka ini karena meskipun perusahaan memiliki dana tunai yang besar, saham mereka belum tentu menjadi pilihan yang tepat untuk investasi dan mereka harus mempertimbangkan faktorfaktor yang lain.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Martinez, Souza dan Mor (2016) Tujuan dari studi ini adalah untuk menyediakan bukti mengenai hubungan antara *book tax differences* (BTD), kepekaan dan ketekunan dan perencanaan pajak dalam skenario Brasil. Sampel sesuai dengan semua perusahaan nonfinancial terdaftar di BM & FBovespa yang mengungkapkan laporan keuangan gabungan antara 2003 dan 2012, diperoleh dari database Ekonática. Periode sampel dipilih untuk memperkuat tahun ketika penggunaan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) menjadi wajib di Brasil. Berdasarkan model ekonomis yang dipersembahkan oleh Hanlon (2005) dan dimodifikasi oleh (Blaylock et al., 2012) kami mengamati signifikansi statistik kemunduran kembali dalam konteks Brasil. Koefisien dari variabel sekarang mengindikasikan penurunan daya laba, selain menunjukkan bahwa laba menjadi kurang gigih setelah adopsi IFRS. Hasil juga menyediakan bukti statistik bahwa BTDs positif sementara memberikan informasi incremental yang berguna tentang besarnya *accruals* dan bahwa dengan memeriksa *accruals* hal ini mungkin untuk memprediksi ketekunan laba dan komponen mereka

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dridi dan Adel (2016) melakukan penelitian tentang *book tax differences*, persistensi laba dan akrual: bukti Tunisia penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah persistensi laba, *accruals* dan arus kas dipengaruhi oleh perbedaan antara laba akunting dan laba pajak penghasilan (BTD). Penelitian ini membantu dalam dua garis penelitian. Pertama kita telah memperluas literatur yang menafsirkan BTD. Kami menggunakan bagian diskresioner dari BTD untuk memperkirakan manipulasi manajerial Kontribusi kami adalah untuk menggunakan metode yang berbeda untuk memperkirakan BTD melalui sisa regresi beberapa. Kedua, kami mencoba untuk menyelidiki apakah diskresioner BTD adalah sebuah penghargaan yang berguna. Kami menguji sampel dari 21 perusahaan Tunisia yang terdaftar dalam bursa saham dalam periode dari 2003 sampai 2012. Berdasarkan contoh dari 21 Perusahaan Tunisia terdaftar di bursa saham, kita mencapai hasil berikut: kita menemukan bahwa pengamatan kelompok dengan BTD negatif besar menunjukkan persistensi lebih rendah dari kelompok yang memiliki positif

BTD dan small BTD, merefleksikan secara signifikan lebih rendah dari kelompok lain bahwa grup pengamatan dengan BTD besar memiliki ketahanan lebih dibandingkan dengan small BTD. studi kami menimbulkan pertanyaan pada penelitian daerah lain. Kami mengukur tingkat BTD untuk mendeteksi persistensi laba sebagai atribut dari kualitas laba. Namun, ada atribut lain yang memenuhi syarat pendapatan dirilis oleh perusahaan. Sebagai contoh relevansi dan kelancaran pendapatan. Kami mengusulkan untuk memperpanjang penelitian ini dengan mempelajari dampak BTD pada kualitas informasi yang diungkapkan. Studi ini adalah aliran baru penelitian tentang strategi pajak yang di gunakan di Tunisia. Hasil kita penting untuk normalisasi dan legislator yang ingin meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan dan laporan pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan

Laporan keuangan komersial yang berupa neraca dan laba rugi disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim di terima dalam praktik (Pohan, 2013: 240). Sejak tahun 1995 prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi. Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau *stakeholders*. Para investor (pemegang saham) atau calon investor, para kreditur termasuk perbankan untuk kepentingan pasar modal (Bursa Efek Indonesia). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan kepentingan bisnis lainnya.

Laporan keuangan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian melakukan suatu rekonsiliasi antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Dengan kata lain, laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan disebut dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal disusun tanpa harus mengolah *data base*

pembukuan atau tidak perlu dibuat suatu sistem akuntansi khusus untuk keperluan perpajakan.

Pada dasarnya yang membedakan laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial adalah bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal didasarkan pada penerapan mekanisme atau prinsip *taxable* dan *deductible* (*taxability-deductibility mechanism*). Prinsip *taxable* (dapat dipajaki) dan *deductible* (dapat dikurangi) akan prinsip yang lazim diterapkan dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak (*taxable*) menjadi penghasilan yang tidak merupakan objek pajak (*non taxable*) (Pohan, 2013:41), serta mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan (*non deductible*) menjadi biaya yang boleh dikurangkan (*deductible*) atau sebaliknya. Didasarkan pada ketentuan perpajakan dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak akibat perubahan tersebut.

Implementasi dari konsep *taxability deductibility* juga berarti bahwa biaya-biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dari pihak pembayar apabila pihak penerima uang atas biaya perusahaan tersebut melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenai pajak. Penghitungan laba komersial mengacu pada *matching of cost with revenue* (pengaitan biaya dengan pendapatan). Konsep ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari peristiwa lain yang sama (IAI, 2009). Apabila pengakuan suatu pendapatan di tunda, maka pembebanan biaya juga akan di tunda sampai saat diakuinya pendapatan tersebut. Laba kena pajak atau penghasilan kena pajak merupakan laba yang dianut dalam melakukan perhitungan. Prinsip *taxability deductibility* yang dianut dalam melakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak dengan benar dan tepat, pada dasarnya adalah penjabaran dari ketentuan perpajakan yang diterapkan pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 (penghasilan) dan Pasal 6 ayat 1 (biaya *deductible*) serta pasal 9 ayat 1 (biaya *non deductible*). Undang-undang No. 7 Tahun 1983 yang di ubah terakhir kali dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, 2008).

2.2.2 Laba

Laba adalah keuntungan bersih yang di dapatkan suatu perusahaan atau individu dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya selama periode tertentu . Dari ilmu ekonomi, laba di definisikan sebagai suatu peningkatan seorang investor dari kegiatan bisnisnya yaitu keuntungan atau hasil penanaman modal setelah dikurangi biaya-biaya dalam menjalankan bisnisnya. Sedangkan dalam ilmu akuntansi laba adalah selisih postif antara pendapatan dan penjualan dengan biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode tertentu. Menurut (Warren et al., 2017) laba adalah selisih antara jumlah di terima dari pelanggan atas barang atau jasa yang diberikan dan jumlah yang di bayarkan untuk input yang digunakan untuk menyediakan barang atau jasa.

Dalam hal ini laba (profit) merupakan alat ukur keberhasilan menejemen suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya dimana indikatornya ialah pendapatan dan biaya. Dari penjelasan definisnya laba memiliki karakteristik tertentu diantaranya :

- a) Penentuan laba dilakukan berdasarkan transaksi yang benar-benar terjadi .
- b) Laba merupakan prestasi sebuah perusahaan atau individu pada periode tertentu.
- c) Penentuan laba di dasarkan pada prinsip pendapatan yang membutuhkan pemahaman mengenai definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan .
- d) Penentuan laba membutuhkan pengukuran mengenai biaya dalam bentuk biaya historis untuk mengetahui pendapatan tertentu .
- e) Penentuan laba didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dan biaya yang relevan dengan pendapatan tersebut.

Dalam menentukan unsur laba terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Adapun unsur-unsur laba adalah sebagai berikut :

- a) Pendapatan
- b) Beban (*Expense*)
- c) Biaya (*Cost*)

- d) Untung dan Rugi (*Profit and Loss*)
- e) Penghasilan (*Income*)

Laba atau keuntungan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Menurut Zaki Bridwan (2004:34) adapun jenis-jenis laba adalah sebagai berikut :

- a) Laba kotor adalah selisih positif antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan (HPP). Laba ini belum dikurang dengan biaya operasional dalam satu periode tertentu.
- b) Laba bersih operasional adalah laba kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan (HPP) dan semua biaya dalam kegiatan usaha.
- c) Laba bersih sebelum pajak yaitu pendapatan perusahaan sebelum pajak atau perolehan operasional dikurangi atau di tambah dengan selisih pendapatan dan biaya lainnya.
- d) Laba bersih setelah pajak adalah laba yang diperleh setelah di tambah atau dikurang dengan pendapatan dan operasional dan dikurangi dengan pajak.

Besar kecilnya laba yang di peroleh suatu perusahaan atau individu di pengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut (Mulyadi, 2001) ada tiga faktor yang mempengaruhi laba yaitu :

- a) Biaya adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengolah suatu produk atau jasa sehingga mempengaruhi harga jual produk tersebut
- b) Harga jual besar kecilnya harga jual suatu produk akan mempengaruhi jumlah atau volume penjualan produk tersebut
- c) Volume penjualan dan produksi akan mempengaruhi jumlah produksi produk-produk tersebut. Pada saat yang sama, volume produksi juga mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.

2.2.3 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU KUP). Peranan pajak semakin besar dan signifikan dalam menyumbangkan penerimaan negara, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan pemerintah dari pajak dalam APBN, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan maupun untuk biaya rutin negara. Pemungutan pajak bukanlah merupakan hal yang mudah diterapkan.

Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang di pertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Masri dan Martani, 2012). Dari sisi fiskus pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Kedua sisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan yang menginginkan pajak yang di bayarkan sekecil mungkin sedangkan dari sisi fiskus sebagai prinsipal menginginkan penerimaan yang sebesar-besarnya.

Perebedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidak patuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam praktik bisnis umumnya pengusaha mengindentikan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalisasi laba (Puspitasari & LI, 2012). Manajemen pajak adalah sarana untuk tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Semenjak era reformasi perpajakan dijalankan dengan di keluarkannya undang-undang perpajakan yang baru tahun 1983, sistem perpajakan berubah dari *office assesment* menjadi *self assesment*.

Dengan sistem yang baru ini, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban pajak perpajakannya. Besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus di bayarkan. Karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planing* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Dalam menetapkan penghasilan kena pajak harus dihitung terlebih dahulu berapa penghasilan bruto yang menjadi objek pajak, kemudian dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*). Selisih atas keduanya (penghasilan bruto-biaya *deductible*) adalah laba kena pajak yang menjadi objek pengenaan pajak penghasilan diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008.

Undang-undang pajak penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya membedakan penghasilan menjadi dua yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak pun dibedakan menjadi dua yaitu penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan pajak penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final. Selain itu peraturan perpajakan membagi beban menjadi dua yaitu beban yang boleh dikurangkan (*deductible expense*) dengan beban yang tidak boleh di kurangkan (*non deductible expense*).

Pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang di terima oleh wajib pajak badan. Pajak penghasilan badan ada yang bersifat final dan tidak final. Pajak penghasilan badan yang bersifat final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang di terima wajib pajak badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pajak penghasilan badan yang bersifat tidak final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang di terima oleh wajib pajak badan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya di sebut Undang-undang PPh tahun 2000,. Tarif pajak penghasilan diatur pada pasal 17 :

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
s.d. Rp 50.000.000,00	10 %
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15 %
Diatas Rp 100.000.000,00	30 %

Tarif pajak ini berubah pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan ke empat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008, menjadi tarif tunggal 28 % dan tahun 2010 menjadi 25 % alasan perubahan tarif ini adalah :

- a) Tarif tunggal selaras dengan prinsip netralitas dalam pengenaan pajak atas badan.
- b) Tarif diturunkan secara bertahap untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain dalam menarik investasi luar negeri.

Sehubungan dengan perubahan tarif progresif menjadi tarif tunggal ini pemerintah mengeluarkan Pasal 31 E Undang-undang PPh Tahun 2008 yaitu wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dinakan atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Perhitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31 E dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a) Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 maka perhitungan PPh terutang sebagai berikut : $\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{seluruh Penghasilan Kena Pajak}$
- b) Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000.000,00 maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perhitungan PPh Terutang

(50% + 25%) x Penghasilan Kena Pajak dari bagian = peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	+	25% x Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas
--	---	--

- Perhitungan penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu :

$$= \frac{4.800.000.000,00}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

- Penghitungan kena pajak dari peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak – Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

2.2.4 Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah beban pajak (*deferred tax expense*) atau manfaat pajak (*deferred tax income*) yang dapat memberikan pengaruh menambah atau mengurangi beban pajak tahun bersangkutan. Definisi pajak tangguhan dapat dipahami dua sudut pandang akuntansi yaitu sebagai akun aset dan liabilities (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya akumulasi rugi pajak belum dikompensasikan, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Dengan definisi ini muncul konsep tentang pemulihan pada masa mendatang. Aset perpajakan tangguhan merupakan jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak. Definisi ini juga yang memunculkan konsep tentang terutang pada periode mendatang. Manfaat (beban) pajak tangguhan adalah nilai aset atau manfaat dari pajak yang di tangguhkan akan menghapus kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayarkan pada masa mendatang. Nilai aset atau manfaat pajak ini timbul dari perbedaan antara laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak. Perlakuan akuntansi untuk pajak yang di tangguhkan alias ditunda diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (PSAK No.46) tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi pajak yang di tangguhkan terdiri dari empat kegiatan yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan.

- a) Pengakuan aktiva atau aset dalam kewajiban perpajakan yang ditunda pada laporan keuangan. Artinya bahwa perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aktiva atau akan melunasi nilai tercaatat pada kewajiban. Perbedaan temporer dapat menambah jumlah pajak dimasa depan akan diakui sebagai kewajiban (utang pajak yang di tangguhkan dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan)
- b) Pengukuran pajak tangguhan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku di masa yang akan datang. Seperti yang di nyatakan dalam PSAK No. 46 paragraf 30 pengukuran atas kewajiban dan aset pajak yang ditunda harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan di terapkan pada periode dimana aset direalisasikan atau kewajiban dilunasi. Yaitu tarif pajak yang berlaku pada tanggal neraca. Secara teknis pengakuan kewajiban dan aktiva pajak yang di tunda ini dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan. Serta perbedaan temporer antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.
- c) Penyajian aset dan kewajiban pajak yang di tangguhkan harus disajikan secara terpisah dari aset atau kewajiban pajak terkini serta disajikan

dalam unsur *non current* atau tidak lancar dalam neraca. Sementara beban atau penghasilan (manfaat) pajak yang di tangguhkan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan laba rugi perusahaan. Aset dan kewajiban pajak harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini (PSAK No. 46 paragraf 45). Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan aset dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aset dan kewajiban tidak lancar maka aset (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset (kewajiban) lancar.

- d) Pengungkapan pajak yang di tangguhkan diatur dalam PSAK No. 46 paragraf 56 sampai dengan paragraf 63. Pada paragraf 56 dijelaskan beberapa hal yang di tangguhkan dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.2.5 Rekonsiliasi Fiskal

Perbedaan permanen dan perbedaan temporer menyebabkan wajib pajak harus melakukan penyesuaian atau rekonsiliasi sehingga tidak perlu membuat pembukuan ganda. Rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT Tahunan PPH Badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian laba/rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan laba/rugi yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal) (Pohan., 2013: 319). Hampir semua perhitungan laba akuntansi yang dihasilkan mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan penghasilan kena pajak karena banyaknya ketentuan dari perpajakan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Penyesuaian di perlukan agar laba yang di perhitungkan secara akuntansi diperlakukan sebagai laba atau penghasilan kena pajak.

Koreksi fiskal terbagi menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif (Pohan, 2013:320), koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang menambah besarnya laba kena pajak sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang mengurangi laba kena pajak. Koreksi fiskal

positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah hal ini diakibat adanya :

- a) Beban yang tidak diakui oleh pajak
- b) Penyusutan komersial lebih besar dari pada penyusutan menurut fiskal
- c) Amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal
- d) Penyesuaian fiskal positif lainnya

Sedangkan koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang yang biasanya di sebabkan karena adanya:

- a) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- b) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final
- c) Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal
- d) Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal
- e) Penghasilan yang di tangguhkan pengakuannya
- f) Penyesuaian fiskal negatif lainnya

2.2.6 Book Tax Differences

Book tax differences adalah perbedaan antara jumlah laba akuntansi dengan jumlah laba fiskal. Perbedaan ini timbul karena adanya tujuan antara aturan akuntansi dengan aturan perpajakan. Aturan akuntansi bertujuan untuk menciptakan laporan keuangan yang relevan dan dapat di andalkan oleh pengguna laporan keuangan seperti menejemen, investor, dan kreditor dalam mengambil keputusan. Sedangkan laporan fiskal timbul karena adanya peraturan perpajakan bertujuan untuk pemungutan yang adil dan terjaganya pendapatan negara yang berasal dari pajak.

Laba yang dilaporkan pada laporan keuangan komersial disebut laba akuntansi (laba bersih sebelum dikurangi beban pajak suatu periode). Sedangkan laba yang di laporkan pada laporan keuangan fiskal disebut laba fiskal. Perbedaan ini menyebabkan transaksi yang sama dapat diperlakukan secara berbeda oleh perusahaan. Adanya bukti mengenai kegunaan *book tax differences* dalam kaitannya dengan informasi laba menjadikan informasi mengenai *book tax differences* menjadi penting untuk di pahami. Pada

prinsipnya ada beberapa elemen dasar yang menjadi penyebab perbedaan seperti yang diuraikan berikut ini:

- a) Tentang penghasilan atau beban itu ada yang merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008) dan ada yang bukan (Pasal 4 ayat 3 UU PPh No.36 tahun 2008)
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan PPh final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh No.36 tahun 2008) dan ada yang tidak dikenakan PPh final (Pasal 4 ayat 3 UU PPh No.36 tahun 2008)
- c) Biaya atau pengeluaran ada yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) (Pasal 6 UU PPh No.36 tahun 2008) dan yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Pasal 9 UU PPh No.36 tahun 2008)
- d) Perbedaan metode pembukuan atau pencatatan antara akuntansi dan fiskal misalnya penyusutan, amortisasi, penilaian persediaan, dan pencadangan.
- e) Pemilihan pembukuan atau pencatatan terkait dengan dengan apakah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan perpajakan yang di perbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (Pasal 28 UU KUP) sehingga diperbolehkan menggunakan catatan.
- f) Penyelenggaraan pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan pilihan penggunaan stelsel akrual dengan stelsel kas.

Berdasarkan dasar penyusunan dalam perhitungan laba perusahaan antara laba akuntansi dengan laba pajak menimbulkan perbedaan besaran jumlah laba akuntansi (penghasilan sebelum pajak) dengan laba fiskal (penghasilan kena pajak). Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara (*temporary differences*)(Hery, 2017).

Perbedaan permanen (*permanen differences*) terjadi karena administrasi pajak menghitung laba fiskal berbeda dengan laba pembukuan (menurut Standar Akuntansi) tanpa koreksi kemudian hari (Agung, 2011:349). Hal ini menyebabkan adanya perbedaan laba total selama masa eksistensi perusahaan yang dihitung menurut ketentuan perpajakan dan prinsip akuntansi. Perbedaan permanen dapat positif (laba pembukuan lebih besar dari laba fiskal) dengan adanya laba akuntansi yang tidak diakui demikian oleh ketentuan perpajakan dan relif pajak (Agung, 2011:349). Namun apabila laba pembukuan lebih rendah dari laba fiskal akan terdapat perbedaan permanen negatif dengan adanya pengeluaran sebagai beban laba pembukuan yang tidak diakui demikian menurut ketentuan fiskal. Perbedaan permanen tidak memungkinkan adanya restorasi hubungan kausal antara laba fiskal dan laba pembukuan karena selama keberadaan perusahaan kedua laba itu tidak akan terjadi kesamaan jumlah laba.

Perbedaan waktu yang bersifat sementara terjadi karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan beban administrasi pajak dan masyarakat profesi akuntan (Agung, 2011: 350). Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk tujuan pajak lebih cepat dari pengakuan beban untuk akuntansi atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Sebaliknya perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban menurut praktek akuntansi dan akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari penghasilan menurut ketentuan perpajakan.

2.2.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran skala atau variabel yang menggambarkan besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan seperti total aktiva, log size, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal dan lain-lain. Ukuran perusahaan dianggap mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran perusahaan semakin mudah perusahaan memperoleh sumber pendanaan yang dapat

dimanfaatkan untuk mencapai tujuan perusahaan (Indriyani, 2017). Menurut Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang usaha kecil (Undang, 1995), perusahaan dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

- a) Perusahaan kecil. Perusahaan kecil merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki sejumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari 20 miliar dan bukan merupakan afiliasi dan di kendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah/kecil dan bukan merupakan reksadana.
- b) Perusahaan menengah besar merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha. Usaha ini merupakan usaha nasional (milik negara atau swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah (Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, 2008), perusahaan dibagi dalam empat jenis yaitu :

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
- 2) Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih

besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah berdasarkan ukuran kekayaan bersih dan hasil penjualan perusahaan dibagi menjadi tiga kriteria yaitu :

- 1) Usaha mikro yaitu (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Usaha kecil yaitu (1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 – Rp. 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 – Rp. 2.500.000.000,00
- 3) Usaha menengah memiliki kriteria (1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 – Rp.10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan. (2) memiliki hasil penjualan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 – Rp. 50.000.000.000,00

Salah satu tolok ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut (Rai Prastuti & Merta Sudiartha, 2016). Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu dapat mencerminkan bahwa perusahaan relatif stabil dan mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan total aset yang kecil. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang di tanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat Yahya (2016).

Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset perusahaan atau total penjualan dimana perusahaan dengan ukuran yang lebih besar di perkirakan akan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan laba yang

lebih besar, sehingga mampu membayarkan dividen yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi sejumlah kebijakan yang di buat oleh perusahaan seperti kebijakan pendanaan, dividen, dan kompensasi.

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas. Sehingga berbagai kebijakan perusahaan akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan yang berukuran besar memiliki kebutuhan dana yang besar juga untuk membiayai aktivitas-aktivitas perusahaannya. Salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan dana tersebut adalah dengan menggunakan utang. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber pemodal yang lebih besar sehingga perusahaan cenderung memiliki hutang yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan yang lebih kecil lebih menyukai utang jangka pendek dibandingkan utang jangka panjang karena biayanya lebih rendah. Bagi investor kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek *cash flow* dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak terhadap besarnya pajak yang di terima. Secara umum, investor akan lebih percaya pada perusahaan besar karena dianggap mampu untuk terus meningkatkan kualitas labanya melalui serangkaian upaya peningkatan kinerja perusahaan Dewi dan Putri (2015).

2.2.8 Persistensi Laba

Persistensi laba merupakan salah satu unsur prediktif dimana laba harus mampu membuat perbedaan pengambilan keputusan dengan membatu pengguna untuk memprediksi dari masa lalu, sekarang dimasa yang akan datang. Jadi tidak hanya laba yang tinggi yang harus di perhatikan oleh investor tetapi presistensi laba juga harus di perhatikan.

Persistensi laba mengindikasikan laba yang berkualitas karena menunjukan bahwa perusahaan dapat mempertahankan labanya dari waktu ke waktu (Septavita, 2016), serta melihat bahwa perusahaan tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menyesatkan pengguna informasi karena laba perusahaan tidak berfluktuatif tajam setiap periodenya. Menurut (Noftria dan Sebrina, 2014) bila perusahaan melaporkan laba dengan kenaikan atau

penurunan yang signifikan tanpa keterangan yang memadai, maka para pengguna laporan keuangan harus lebih cermat. Hal ini dikarenakan dicurigai manajemen melakukan manajemen laba, dan kemungkinan informasi yang terkandung dalam laba tersebut tidak berkualitas tinggi serta tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

Jika perusahaan melaporkan laba dengan tingkat kenaikan yang sangat signifikan secara tiba-tiba dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka ada kemungkinan manajemen perusahaan melakukan rekayasa. Begitu pula sebaliknya jika perusahaan melaporkan laba dengan tingkat penurunan yang sangat drastis atau perusahaan mengalami kerugian yang besar tanpa keterangan yang memadai maka ada kemungkinan manajemen perusahaan mencoba melakukan penghindaran pajak Utari dan Mertha (2016). Laba yang persisten diartikan sebagai kemampuan laba suatu perusahaan untuk bertahan dimasa depan. laba perusahaan yang mampu bertahan di masa depan inilah yang mencerminkan kualitas laba. Oleh sebab itu, persistensi laba sering dianggap sebagai alat ukur untuk menilai kualitas laba yang berkesinambungan. Persistensi laba menjadi pembahasan yang sangat penting karena investor memiliki kepentingan informasi terhadap kinerja perusahaan yang tercermin dalam laba di masa depan Dewi dan Putri (2015). Sumber utama informasi persistensi laba adalah :

- a) Laporan laba rugi yang mencakup komponen : pendapatan dari operasi yang di lanjutkan, pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, keuntungan dan kerugian luar biasa, dampak kumulatif dari perubahan pada prinsip-prinsip akuntansi
- b) Laporan keuangan lainya dan catatan atas laporan keuangan
- c) Diskusi dan analisis manajemen

Manajemen laba, variabilitas, tren dan insentif merupakan seluruh determinan yang berpotensi mempengaruhi persistensi laba. Tren laba sering kali mengungkapkan petunjuk penting mengenai kinerja dan kualitas manajemen. Kita juga wajib waspada terhadap distorsi akuntansi yang mempengaruhi tren khususnya terkait perubahan prinsip akuntansi dan dampak dari penggabungan bisnis terutama pembalikan.

Salah satu motivasi utama dari manajemen laba adalah mempengaruhi tren laba. Praktik manajemen laba mengasumsikan tren laba merupakan hal penting untuk valuasi. Selain itu praktik manajemen laba juga merefleksikan kepercayaan bahwa revisi retroaktif berupa penyajian kembali laba sebelumnya hanya sedikit berdampak terhadap harga sekuritas.

Tujuan dari manajemen laba adalah untuk menurunkan variabelitas laba kedalam beberapa periode melalui pemindahan laba antara periode yang baik dengan periode yang buruk, antara periode pada saat ini dan periode mendatang, atau melalui kombinasi lainnya (Subramanyam, 2014) . Manajemen laba secara aktual dapat dilakukan dalam berbagai bentuk diantaranya:

- a) Perubahan pada metode atau asumsi akuntansi
- b) Saling menghapuskan keuntungan dan kerugian luar biasa dan tidak biasa
- c) *Big baths* teknik ini mengakui beban di masa mendatang pada periode masa kini, saat kinerja periode masa kini harus menghadapi kondisi buruk yang sulit dihindari. Praktik ini menghindari pengeluaran beban di masa mendatang yang dapat mengurangi laba.
- d) *Write-downs* penurunan nilai atas aset operasi pabrik dan peralatan aau aset tidak berwujud seperti *goodwil* ketika hasil operasi perusahaan buruk merupakan salah satu betuk lain dari manajemen laba. Perusahaan seringkali membenarkan *write downs* dengan berpendapat bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak mendukung nilai aset yang dilaporkan
- e) Menentukan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Teknik ini dilakukan dengan mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk mengelola laba termasuk tren.

Beberapa menejer, pemilik, dan pegawai memanipulasi serta mendistorsi laba yang dilaporkan untuk keuntungan pribadi. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan paling rentan terhadap tekanan ini. Praktik tersebut seringkali dibenarkan oleh individu-individu tertentu sebagai upaya mempertahankan kelangsungan perusahaan. Perusahaan yang mapan

terkadang berusaha mempertahankan reputasi yang telah sulit diperolehnya, sebagai perusahaan dengan laba yang bertumbuh, melalui manajemen laba. Program kompensasi dan insentif berbasis nilai akuntansi lainnya atau hambatan-hambatan lainnya menambah motivasi bagi manajer untuk mengelola data.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Book Tax Differences Yang Di Proksikan Perbedaan Tetap dengan Perbedaan Sementara Terhadap Persistensi Laba

Beda tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa adanya koreksi dikemudian hari (Suandy, 2011). Beda tetap dapat positif jika laba akuntansi lebih besar dibandingkan dengan laba fiskal. Sebaliknya beda negatif terjadi apabila laba akuntansi lebih rendah dibandingkan dengan laba fiskal. Ini berarti penghasilan atau biaya akan diakui selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Misalnya biaya jamuan tamu, natura, serta sumbangan (Prabowo, 2004:300).

Beda sementara terjadi karena adanya ketidaksamaan pengakuan penghasilan dan beban oleh administrasi pajak (Agung, 2011:350). Perbedaan ini dapat berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Beda sementara dikatakan positif apabila pengakuan beban lebih cepat untuk tujuan pajak dibandingkan pengakuan beban untuk tujuan akuntansi (misal penyusutan mulai tahun pengeluaran). Sebaliknya perbedaan sementara dikatakan negatif apabila pengakuan beban lebih lambat menurut pajak dibandingkan pengakuan beban menurut akuntansi.

2.3.2 Hubungan Ukuran Perusahaan Dengan Persistensi laba

Menurut (Hakim & Abbas, 2019) ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat di klasifikasikan berdasarkan berbagai cara, antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas. (Hakim & Abbas, 2019) mengemukakan bahwa pada umumnya perusahaan besar

memiliki aktiva yang besar, skill karyawan yang baik, sistem informasi yang canggih, jenis produk yang banyak, struktur kepemilikan lengkap, sehingga membutuhkan pengungkapan yang luas. Pengelompokan perusahaan atas dasar skala operasi (besar atau kecil) oleh investor sebagai salah satu variabel dalam menentukan keputusan investasi. Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*), dan perusahaan kecil atau (*small firm*) (Hery, 2017). Semakin besar suatu perusahaan maka di harapkan pertumbuhan laba yang tinggi. Pertumbuhan laba yang tinggi akan mempengaruhi persistensi laba dan kesinambungan perusahaan dalam menarik calon investor yang akan di curigai sebagai praktik modifikasi laba.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Sebagaimana dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti mencoba mengembangkan hipotesis sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Book Tax Differences Yang Di Proksikan Dengan Perbedaan Permanen Dan Perbedaan Temporer Terhadap Persistensi Laba

Persistensi laba adalah keberlanjutan laba dimana dari persistensi laba ini dapat menjadi tolok ukur kualitas laba. Persistensi laba digunakan untuk mengukur kualitas laba karena persistensi laba mengandung unsur *predictive value* (membantu memprediksi kejadian-kejadian) sehingga dapat di gunakan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kejadian-kejadian di masa lalu, sekarang dan masa depan. laba yang persisten adalah laba yang mempunyai kemampuan sebagai indikator laba periode mendatang (*future earning*) yang di hasilkan perusahaan secara berulang-ulang (*repetitive*) dalam jangka panjang (Penman dan Zhang dalam Salsabila, *et,al*, 2016).

Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal terjadi karena adanya perbedaan tujuan antara peraturan akuntansi dan peraturan perpajakan. Sehingga perbedaan dasar penyusunan dan tujuan kedua laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba rugi (Hery, 2017). Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal di anggap sebagai kualitas laba.

Artinya semakin rendah kualitas laba maka semakin rendah persistensinya. Perbedaan temporer terjadi apabila penghasilan atau beban diakui sebagai laba akuntansi yang berbeda dengan periode saat penghasilan atau beban tersebut diakui sebagai perhitungan laba fiskal atau laba sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Septavita, 2016) menyatakan bahwa perbedaan temporer berpengaruh terhadap persistensi laba. Perbedaan permanen atau beda tetap terjadi akibat adanya perbedaan peraturan terkait pengakuan pendapatan dan biaya antara ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (Prasetyo dan Rafitaningsih, 2015). Akibat adanya perbedaan peraturan tersebut maka harus dilakukan rekonsiliasi fiskal yang menyebabkan koreksi positif dan koreksi negatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti (Dewi & Putri, 2015a) menyatakan bahwa perbedaan permanen berpengaruh terhadap persistensi laba.

H1 : Perbedaan temporer berpengaruh terhadap persistensi laba

H2 : Perbedaan permanen berpengaruh terhadap persistensi laba.

2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi Laba

Besarnya total aset mencerminkan besarnya sumber daya perusahaan dalam kegiatan utama perusahaan. Perusahaan yang besar akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik karena perusahaan besar akan memiliki kestabilan dan operasi yang dapat di prediksi dengan baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti Septavita (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba. (Dewi & Putri, 2015a) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap persistensi laba. Hal ini berarti semakin besar ukuran perusahaan yang besarnya belum tentu memberikan keuntungan yang besar. Ukuran perusahaan tidak selalu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari persistensi laba suatu perusahaan. Oleh karena itu hipotesis dari penelitian ini adalah :

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap persistensi laba**2.5 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang biasanya di gunakan sebagai alat pendekatan pemecahan masalah, kerangka konseptual membantu menjelaskan hubungan variabel independen dengan variabel dependen (Rompas, 2013).

Gambar 2. 1Kerangka Konseptual Penelitian